

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang tidak dapat terlepas dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu individu ataupun kelompok. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor usaha yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat Indonesia. UMKM bergerak dalam bidang perdagangan dan memiliki pengaruh yang signifikan untuk menciptakan lapangan kerja dan membantu pemerintah mengurangi tingkat pengangguran saat ini. Sangat penting untuk mendukung bisnis ini agar tetap beroperasi dan berkembang agar mereka dapat mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan perekonomian secara berkesinambungan (Elviani et al., 2023). Secara umum, UMKM memiliki karakteristik berikut: manajemennya yang berdiri sendiri, modalnya disediakan secara pribadi, area pemasaran lokal, asetnya yang terbatas, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan (Azizah Rachmanti et al., 2019).

Sebagai entitas bisnis yang menopang perekonomian Indonesia, jumlah UMKM alami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI, pertumbuhan UMKM terus alami peningkatan. Pada tahun 2022 jumlah UMKM yang sudah mendaftarkan bisnisnya di platform OSS sudah mencapai 8,71 juta unit. Kementerian Koperasi dan UMKM juga akan menargetkan setidaknya ada 10 juta unit

UMKM yang teregistrasi dalam sistem OSS di akhir tahun 2023 (Anastasya, 2023).

**Tabel 1.1**  
**Persentase UMKM yang sudah Dan Belum memakai SAK EMKM**

No	Nama Kota	Catatan Akuntansi Sebelumnya	Sesuai SAK EMKM	Tidak Membuat Laporan Keuangan
1	Malang	71,875%	9,375%	18,75%
2	Sidoarjo	-	20%	80%
3	Tangerang	89%	-	19,6%

Data di olah 2024

Di kota Malang menunjukkan 71,875% UMKM sudah menyelenggarakan catatan akuntansi sederhana, 9,375% telah mengimplementasikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, dan 18,75% belum menyelenggarakan catatan akuntansi (Rani, 2020). Di Sidoarjo hampir 80% pelaku usaha UMKM belum membuat laporan keuangan sesuai SAK EMKM, kira – kira hanya 20% umkm yang sudah melakukan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM (Siregar, 2021). Mayoritas UMKM di kota Tangerang dengan persentase 80,4% belum menerapkan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar SAK EMKM (Putra, 2018). Di kota Depok SAK EMKM umumnya hanya di terapkan pada pencatatan keuangan usaha menengah, sedangkan kelompok usaha

kecil dan mikro belum menerapkan SAK EMKM (Hanifati & Leo, 2019). Di kota Surabaya pelaku UMKM dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan masih secara sederhana yang berarti belum sesuai dengan SAK EMKM (Nurwijayanti & Widiastuti, 2021). Di kota Medan 70% - 90% pemilik usahan UMKM menyatakan tidak memahami tentang penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM (Hutapea & Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, 2022). Di daerah Tanjung Riau secara garis besar pelaku UMKM belum menunjukkan adanya penerapan SAK EMKM (Purba, 2019). Dapat di simpulkan bahwa UMKM di berbagai daerah Indonesia mayoritas belum menerapkan SAK EMKM. Tidak hanya UMKM di bagian Timur Indonesia , tetapi UMKM yang terletak di Indonesia Barat maupun Indonesia Tengah banyak yang belum menerapkan SAK EMKM (Manehat & Sanda, 2022).

Perkembangan bisnis yang sangat cepat dan dinamis, menuntut para pelaku usaha khususnya pelaku UMKM harus bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman. Tujuannya agar dapat mempertahankan pasar dan konsumen serta memperluas jaringan bisnis (Triastuti Kurnianingsih et al., 2022).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah pilar ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan, dan pengembangan secara luas. UMKM juga memiliki kemampuan untuk memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berkontribusi pada pemerataan pendapatan dan

pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi pada mewujudkan stabilitas nasional. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu industri riil yang paling banyak dimiliki oleh pengusaha di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengelolaannya mudah dan tidak rumit dan tidak membutuhkan biaya yang besar (Widiastiawati & Hambali, 2020).

Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah jenis usaha yang didirikan oleh masyarakat yang didasarkan pada inisiatif individu. UKM telah berkembang dengan sangat pesat di berbagai wilayah. Di Indonesia sendiri, banyak UKM dengan berbagai jenis usaha telah muncul, dan bahkan telah menjadi pilar dan penghalang pertumbuhan ekonomi Indonesia (Hidayah & Muntiah, 2019).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dan merupakan salah satu penggerak ekonomi nasional. Dengan menyediakan produk berkualitas tinggi dan terpercaya, UMKM diharapkan dapat meningkatkan ekonomi negara dan mengurangi tingkat pengangguran. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) juga merupakan solusi untuk membantu masyarakat tetap hidup meskipun krisis ekonomi terjadi. Hal ini karena kebanyakan para pengusaha kecil dan menengah itu dari industri keluarga atau rumahan (Mangopa et al., 2020).

Namun, selama perjalanannya, UMKM terus menghadapi masalah yang berkaitan dengan kualitas produk dan keberlanjutan usaha. Untuk

membantu mengatasi masalah ini, pemerintah memberi perhatian khusus pada perealisasi dan pengembangan UMKM. Salah satunya adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dimulai pada tahun 2009 dan dimaksudkan untuk memberikan injeksi modal dan pembiayaan untuk UMKM. Selain program KUR, Pemerintah Pusat, dengan dukungan dari Kementerian Keuangan, meluncurkan Pembiayaan Ultra Mikro, juga dikenal sebagai UMi, pada tahun 2017. Program ini bertujuan untuk memberikan kredit yang tidak dapat diakses oleh bank dan tidak dapat dijamin. Kredit dapat diberikan hanya hingga Rp 10.000.000,-, yang merupakan jumlah tertinggi, tetapi masih cukup untuk memulai bisnis mikro. Perlu diingat bahwa tidak hanya diperlukan akses ke pembiayaan atau perbankan, tetapi juga perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan usaha kecil dan menengah (UMKM), dan perbaikan iklim ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan pangsa pasar (Uno et al., 2019).

Untuk meningkatkan keberhasilan UMKM, banyak masalah yang dihadapi. Ini termasuk ketersediaan bahan baku, permodalan, kurangnya pengetahuan tentang banyak hal, seperti manajemen dan sumber daya manusia, dan pencatatan administrasi laporan keuangan yang tidak akurat, yang membuat sulit untuk membuat laporan keuangan yang baik dan benar (Ria, 2018).

Setiap UMKM biasanya menghadapi tantangan karena bisnis stagnan. Selain itu, salah satu hambatan paling signifikan yang

menghalangi pertumbuhan perusahaan mereka adalah akses ke pendanaan yang dipengaruhi oleh faktor lain seperti ukuran, umur, dan tingkat pertumbuhan perusahaan serta kepemilikan. Selanjutnya, kendala yang datang dari luar, seperti tingginya biaya pinjaman dan kurangnya konsultan dukungan. Untuk mengatasi masalah ini, gunakan pembukuan yang baik yang mencatat semua transaksi dan laporan. Ini akan memungkinkan pengusaha untuk melihat hasil pengelolaan dan kemajuan bisnis mereka (Hernawati et al., 2020).

Para pengusaha berharap bisnis mereka akan berkembang dengan keuntungan yang mereka peroleh. Fokus ini yang membuat banyak pengusaha mengabaikan pencatatan keuangan. Dalam kebanyakan kasus, inovasi hanya mencakup masalah produk atau aspek layanan. Namun, bagian administrasi, termasuk manajemen keuangan perusahaan, merupakan bagian penting dari bisnis untuk berkembang (Rinandiyana et al., 2020).

Seringkali, UMKM menghadapi kesulitan saat menjalankan operasional bisnis mereka. Penyusunan dan pengelolaan keuangan adalah salah satu kesuksesan UMKM, tetapi penyusunan laporan keuangan yang buruk adalah masalah utama mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaporan usaha kecil, menengah, dan besar (UMKM) di Indonesia biasanya mencatat jumlah barang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang dan hutang tanpa menggunakan standar akuntansi yang berlaku saat ini, yang secara

langsung dapat berdampak pada berbagai bisnis di seluruh Indonesia. Dengan pertumbuhan bisnis, UMKM harus menyediakan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan itu sendiri dapat digunakan untuk evaluasi kinerja.

Standar akuntansi sangat penting bagi para profesional dan semua orang yang menggunakan laporan keuangan. Oleh karena itu, proses pembuatan standar akuntansi harus diatur dengan cara yang memungkinkan semua pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi keuangan. Standar akuntansi akan terus berkembang dan berubah sesuai dengan bagaimana masyarakat berkembang dan ingin mengubahnya. Semua orang setuju dengan standar akuntansi, yang didukung oleh hukuman untuk pelanggaran. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah dasar untuk praktik akuntansi di Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan ini disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) adalah salah satu standar akuntansi keuangan di Indonesia yang diterbitkan oleh IAI. SAK EMKM lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan standar akuntansi lainnya.

SAK EMKM adalah standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang tidak mampu menyusun laporan keuangan dengan baik. Untuk meningkatkan kemudahan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan kecil dan menengah, Dewan

Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAKIAI) mengesahkan SAK EMKM pada tanggal 24 Oktober 2016. Tujuan dari SAK EMKM diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2018 adalah untuk membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) membuat laporan keuangan yang lebih mudah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Penyusunan laporan keuangan SAK EMKM lebih mudah dan sederhana bagi para pelaku UMKM karena aset dan liabilitas sebesar biaya perolehan dengan menggunakan biaya historis (pencatatan dengan menggunakan harga perolehan). SAK EMKM ini terdiri dari tiga komponen laporan keuangan: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, diterbitkannya SAK EMKM ini akan memudahkan pelaku UMKM menyusun laporan keuangan mereka.

Dengan adanya SAK EMKM, UMKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan SAK umum berbasis IFRS dan SAK ETAP. Ini dikarenakan SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP. Namun, SAK EMKM dinyatakan lebih sederhana dan lebih mudah untuk diterapkan dibandingkan dengan SAK umum berbasis IFRS (Nuvitasari et al., 2019).

Ram kelapa sawit pematang siku jaya merupakan salah satu UMKM yang bergerak dalam bidang penjualan kelapa sawit. Ram kelapa sawit ini merupakan usaha ram pertama dari Bapak Tukimin pada tahun 2020 yang terletak di Jln. Lintas Sekapas Kec, Rantau Kopar. UMKM Ram kelapa sawit ini sudah berdiri selama 3 tahun, seharusnya UMKM Ram



Kelapa Sawit Pematang Siku Jaya sudah menyusun laporan keuangan yang baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi ram ini.

Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini UMKM Ram Kelapa Sawit Pematang Siku Jaya belum menyusun laporan keuangan atas usahanya, tetapi UMKM ini hanya menyusun laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas saja setiap bulannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya manusia yang kurang memahami penyusunan laporan keuangan sehingga tidak dapat menyediakan informasi yang memadai terkait kegiatan operasional usahanya maupun laba usahanya sedangkan terkait dengan informasi yang dituangkan dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat dan mengevaluasi UMKM terhadap perkembangan usahanya. Oleh karena itu, pihak UMKM Ram Kelapa Sawit Pematang Siku Jaya untuk kedepannya perlu menerapkan dan mengevaluasi kinerja usahanya dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM yang berlaku agar usahanya bisa berkembang dan kegiatan operasionalnya dapat terkontrol dengan baik serta dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perkembangan usahanya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Ram Kelapa Sawit Pematang Siku Jaya Berdasarkan SAK EMKM”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakan diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi dalam penerapan SAK EMKM pada UMKM Ram Kelapa Sawit Pematang Siku Jaya yaitu :

1. Masih terbatasnya informasi dalam penerapan SAK EMKM bagi UMKM dari pihak-pihak terkait sehingga pelaku UMKM masih kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Kurangnya pemahaman akuntansi pelaku UMKM karena latar belakang pendidikan yang rendah, pengetahuan yang terbatas, dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan yang kurang efektif.
3. Penggiat UMKM mayoritas belum menerapkan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan, hanya saja membuat pencatatan keuangan sederhana.

## **1.3 Perumusan Masalah**

### **a. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, dengan melihat latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasikan masalah yang terkait dengan tema penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek penggunaan laporan keuangan yang dilakukan pada UMKM Rama Kelapa Sawit Pematang Siku Jaya?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terlaksananya pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Ram Kelapa Sawit Pematang Siku Jaya?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Setelah permasalahan diuraikan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek penggunaan Laporan Keuangan yang dilakukan UMKM Ram Kelapa Sawit Pematang Siku Jaya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi banyak orang yang membutuhkan, diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pembaca lebih banyak pengetahuan tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk diskusi tentang ilmu pengetahuan yang terkait dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi peneliti**

Sebagai bagian dari proses pembelajaran, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman siswa tentang teori SAK EMKM dengan membandingkan situasi nyata di lapangan, dan ini

adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata I di Program Studi Akuntansi.

b. Bagi pihak UMKM

Diharapkan penelitian ini akan membantu mempertimbangkan penerapan SAK EMKM pada usaha kecil dan menengah (UMKM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya menyusun laporan keuangan dan bagaimana SAK dapat diterapkan dalam kegiatan usaha mereka, sehingga mereka dapat memperluas usahanya.

c. Bagi Universitas Islam Sumatra Utara

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi tambahan tentang materi perkuliahan SAK EMKM pada UMKM dan berfungsi sebagai sumber referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Grand Teori

##### 2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan yang ditemukan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, bahwa Teori ini untuk melihat ketidakselarasan antara principal dengan agen, dalam penelitian ini IAI sebagai principal, dan UMKM sebagai agen, yang mana antara principal dan juga agen harus berjalan sejalan. Principal berusaha mengawasi karena tidak adanya kepercayaan, maka perlu dilakukan pengawasan. Oleh karena itu IAI menerbitkan SAK EMKM sebagai patokan dalam pencatatan laporan keuangan, sedangkan UMKM menerapkan setandar yang telah disahkan IAI untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Teori ini muncul seiring dengan perkembangan riset akuntansi yaitu perubahan dari perkembangan model ekonomi. Hubungan yang ditunjukkan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah *agent* akan bertanggung jawab kepada *principal*. Baik ataupun buruknya perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dibuatnya. Pemerintah, khususnya DSAK IAI, berperan sebagai primer dalam kajian ini, dengan pelaku UMKM dapat dengan mudah menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan kepada pemerintah berkat SAK EMKM DSAK IAI, sejalan dengan teori agensi, hal ini didukung dengan penelitian Ayem et al., (2020) menyatakan dilihat dari teori agensi principal dan agen mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan kemajuan

UMKM. IAI sebagai principal menerbitkan SAK EMKM sebagai patokan UMKM dalam pencatatan laporan keuangan, UMKM sebagai agen yang menerapkan standar yang disahkan oleh IAI, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

## **2.2 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)**

### **2.2.1 Pengertian UMKM**

Menurut Purba (2019) definisi UMKM di Indonesia diatur dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro kecil menengah didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah bisnis yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi syarat usaha mikro produktif.
2. Usaha menengah adalah usaha yang berdiri sendiri, dimiliki oleh orang perorangan, maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki/dikuasai yang menjadi bagian baik secara langsung dan tidak langsung dalam skala besar maupun kecil.
3. Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri, dimiliki orang perorangan. Merupakan badan usaha yang bukan merupakan perusahaan cabang yang dimiliki dan dikuasai secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan besar dan memenuhi syarat usaha kecil, yang sedang dalam keadaan produktif.

Menurut Mangopa et al., (2020) usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu jenis usaha yang mendorong perekonomian

Indonesia. UMKM terdiri dari tiga kelompok utama usaha: Mikro, Kecil, dan Menengah.

### 2.2.2 Kriteria UMKM

Adapun kriteria UMKM menurut Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 adalah seperti tabel berikut:

**Tabel 2.2.2**  
**Kriteria UMKM**

<b>Kriteria UMKM</b>	<b>Kekayaan Bersih/ Modal Usaha</b>	<b>Hasil Penjualan Tahunan</b>
UMKM diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha yaitu modal yang berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman.	Mikro: Maksimal Rp 1Milyar. Kecil: Rp 1 – 5 Milyar. Menengah: Rp 5- 10 Milyar. Semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Mikro: Maksimal Rp 2 Milyar. Kecil: Rp 2- 15 Milyar. Menengah: Rp 15- 50 Milyar.

Sumber: Databoks Katadata, 2023

### 2.2.3 Peran UMKM

Meskipun beberapa UMKM mungkin tidak memiliki pengelolaan keuangan profesional, izin, atau persyaratan hukum lainnya, keberadaannya memainkan peran penting dalam ekonomi negara.

### 2.2.4 Permasalahan Dalam UMKM

Menurut Sri et al., (2019) ada dua faktor yang biasanya menyebabkan masalah yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah:

- a. Faktor Internal

1). Kurangnya permodalan

Salah satu faktor terpenting yang dibutuhkan oleh unit usaha adalah modal. UMKM akan sulit untuk mengembangkan usahanya jika mereka tidak memiliki modal karena modalnya biasanya berasal dari pemilik yang sedikit. Di sisi lain, memperoleh modal pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank atau non-bank sangat sulit karena adanya persyaratan administratif yang sulit dipenuhi.

2). Sumber daya manusia yang terbatas

Pada umumnya usaha kecil yang berada di Indonesia tumbuh dengan berdasarkan usaha tradisional yang merupakan suatu usaha yang turun temurun, sehingga mereka tidak terlalu memperdulikan adanya proses pembukuan atau pencatatan transaksi yang dijalankan sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan UMKM sulit mendapatkan bantuan modal dari pihak luar.

3). Lemahnya jaringan usaha dan keterampilan pemasaran.

Usaha kecil dan menengah biasanya dimiliki oleh keluarga, sehingga jaringan pemasaran untuk produk tersebut diperkirakan sangat terbatas sehingga jumlah penjualan relatif kecil. Selain itu, teknologi yang digunakan biasanya tradisional, sehingga hasil produksinya lebih sedikit dan pada akhirnya kualitas produksinya lebih rendah.



b. Faktor Eksternal

1). Iklim Usaha (Lingkungan Bisnis)

Kebijakan pemerintah dalam mendorong suatu perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah dari tahun ketahun masih terus disempurnakan, akan tetapi hal tersebut di rasakan belum menguntungkan, hal ini terlihat dari situasi pasar dimana masih terdapat persaingan pasar yang masih kurang sehat antara pemilik usaha kecil dan pemilik usaha besar.

2). Sarana dan prasarana usaha yang terbatas

Kurangnya informasi tentang perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat menyebabkan sarana dan prasarana yang dimiliki tidak dapat berkembang atau bahkan cenderung tidak mendukung perkembangan usahanya sebagaimana diharapkan.

3). Tambahan modal

Permodalan adalah masalah umum yang dihadapi oleh UMKM. Bank tidak dapat memberikan pembiayaan karena UMKM tidak dapat menyediakan laporan pembukuan dalam waktu yang diminta oleh bank.

4). Sifat produk dengan *lifetime* pendek

Sebagian besar produk industri kecil mempunyai ciri atau karakteristik sebagai produk *fashion* dan kerajinan tangan yang berumur pendek atau tergolong kedalam produk *lifetime* pendek.

5). Akses pasar yang terbatas

Produk yang dibuat mungkin tidak dapat dipasarkan secara kompetitif atau bersaing di pasar domestik dan internasional jika memiliki akses pasar yang terbatas.

## **2.3 Laporan Keuangan**

### **2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut IAI (2009) “laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan-catatan dan berbagai integral dari laporan keuangan”.

PSAK No 1 (revisi 2009) “menyatakan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan”.

Ikatan Akuntan Indonesia, (2016) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang ada dalam akuntansi. Laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan materi penjelasan yang merupakan bagian yang tersusun dari laporan keuangan. Laporan keuangan tidak hanya berguna untuk menguji, tetapi juga dapat

digunakan untuk menentukan dan menilai keadaan keuangan suatu perusahaan.

### **2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja suatu entitas sehingga pengguna dapat menggunakannya untuk membuat keputusan ekonomi (Tatik, 2018).

Menurut Kasmir,(2014) tujuan dari pembuatan atau penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Memberikan suatu informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban serta modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi yang berkaitan tentang jenis dan jumlah pendapatan untuk periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang total biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan pada periode tertentu.
5. Memberikan informasi yang berkaitan tentang perubahan yang terjadi pada aktiva pasiva serta suatu modal (ekuitas) perusahaan.
6. Memberikan informasi yang berkaitan tentang pengelolaan perusahaan selama periode tertentu.
7. Memberikan informasi yang berkaitan tentang catatan atau laporan keuangan.

8. Memberikan informasi keuangan lainnya.

### **2.3.3 Jenis Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir, (2014) menyatakan bahwa lima jenis laporan keuangan yang umum digunakan adalah neraca, posisi, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengertian lima jenis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

#### **1. Laporan posisi keuangan/Neraca**

Laporan Posisi Keuangan atau Neraca, juga disebut sebagai balance sheet, adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, biasanya per tanggal tertentu, seperti per tanggal 31 Desember 2017.

##### **a. Aset (Aktiva) atau Harta**

Keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh atau dikuasai oleh lembaga tertentu sebagai hasil dari transaksi yang sudah berlaku disebut aset. Aset ini terdiri dari tiga bagian:

##### **1. Aset Lancar**

Aset lancar adalah sumber daya seperti kas, piutang bisnis dan dagang, persediaan, peralatan kantor, dan biaya dibayar dimuka. Berdasarkan penyusunannya, aset lancar harus didasarkan pada likuiditasnya, yaitu kemampuan aset untuk diubah menjadi kas.

## 2. Aset Tetap

Aset yang diperoleh untuk digunakan dalam operasi bisnis disebut aset tetap. Kecuali tanah disusutkan, masa manfaat aset ini lebih dari satu tahun. Peralatan, kendaraan, bangunan, dan mesin adalah contoh aset tetap.

## 3. Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang dapat diperoleh perusahaan untuk digunakan dalam operasinya. Perbedaan utama antara aset tak berwujud dan aset tetap adalah mereka tidak memiliki bentuk fisik dan masa manfaat mereka tidak pasti.

### b. Liabilitas (kewajiban)

Kewajiban, juga dikenal sebagai hutang, adalah jumlah yang harus ditransfer dari satu tahun ke tahun berikutnya berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Liabilitas terdiri dari dua bagian, yaitu liabilitas lancar dan jangka panjang, dan ekuitas pemilik, yang mencakup:

1. Kewajiban/Liabilitas lancar yaitu suatu kewajiban yang dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar jika dalam jangka waktu dua belas bulan dapat diselesaikan dari tanggal laporan posisi keuangan atau siklus normal operasi suatu perusahaan. Sebagai contohnya adalah utang usaha, utang pajak,

pendapatan diterima dimuka, biaya yang masih harus dibayar, dan utang gaji /upah.

2. Kewajiban Jangka Panjang: Ini adalah kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari satu tahun dari tanggal laporan posisi keuangan. Sebagai contoh, hutang seperti obligasi, hipotek (pinjaman bank yang memerlukan jaminan aset tetap) dan hutang bank.

c. Modal (Ekuitas).

Modal adalah bagian dari hak pemilik yang merupakan nilai aset perusahaan setelah dikurangi dari liabilitasnya.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi, juga dikenal sebagai laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil bisnis perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi menggambarkan jumlah pendapatan dan sumber pendapatan yang diperoleh, serta jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Berdasarkan jumlah pendapatan dan biaya, terjadi selisih yang disebut laba atau rugi. Menurut Harahap, (2013), laporan laba rugi terdiri dari beberapa elemen:

a. Pendapatan

Pendapatan adalah uang yang dihasilkan oleh suatu bisnis dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan yang menerima jasa tersebut.

b. Beban

Beban adalah arus kas keluar aset atau timbulnya pasiva selama suatu waktu yang disebabkan oleh pengiriman barang atau kegiatan lain yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam upaya menghasilkan laba, yang dapat mengurangi penghasilan.

c. Keuntungan/Laba

Keuntungan adalah kenaikan aset neto yang disebabkan oleh transaksi yang tidak menghasilkan pendapatan utama. Sebagai contoh, perusahaan dagang memperoleh pendapatan dari penjualan produk yang dijual oleh pelanggan mereka. Ketika perusahaan menjual peralatan dengan harga jual lebih tinggi dari biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan, penjualan peralatan tersebut dianggap sebagai keuntungan.

d. Kerugian

Komponen terakhir ini berlawanan dengan profit; itu berarti ekuitas menurun karena transaksi, beban, dan distribusi ke pemilik usaha.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan Perubahan Modal menunjukkan jumlah dan jenis modal perusahaan saat ini, serta menjelaskan perubahan modal dan faktor-faktor yang menyebabkannya.

#### 4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas mencakup semua hal yang berkaitan dengan operasi perusahaan, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada arus kasnya. Laporan arus kas terdiri dari arus kas masuk (*cash in*) dan arus kas keluar (*cash out*) selama periode tertentu. Kas masuk terdiri dari uang yang masuk ke perusahaan, seperti uang dari penjualan atau penerimaan.

#### 5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang membantu jika laporan keuangan tertentu memerlukan penjelasan khusus.

### **2.3.4 Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang baik harus berisi informasi tentang kegiatan ekonomi, bisnis, dan akuntansi sehingga dipahami dengan mudah oleh pengguna dan pembaca. Informasi ini harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pengguna. Kesalahan dalam memasukkan atau mencatat informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pemakai laporan.

Kualitas laporan keuangan, menurut Fajri, (2013), didefinisikan sebagai pelaporan yang terstruktur tentang transaksi dan tindakan yang dilakukan oleh entitas pelapor. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila



informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pengguna, bebas dari kesalahan atau pengertian yang menyesatkan, dan dapat diandalkan sehingga laporan keuangan dapat digunakan untuk membuat keputusan.

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas tinggi adalah hasil dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan informasi keuangan yang dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna untuk membuat keputusan ekonomi di masa depan.

### **2.3.5 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Pangestika, (2023), laporan keuangan berkualitas memiliki ciri-ciri untuk memberikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya. Laporan keuangan yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan harus memenuhi standar kualitas dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengannya. Menurut standar akuntansi, beberapa karakteristik kualitas laporan keuangan yang memuat informasi yang dapat bermanfaat bagi penggunanya adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting laporan keuangan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, dengan anggapan bahwa pemakai mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai aktifitas ekonomi dan bisnis.

2. Relevan

Relevan yang berarti informasi keuangan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat membantu pemakai serta mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

### 3. Andal

Informasi dikatakan andal apabila informasi itu bebas dari pengertian yang menyesatkan, mempunyai kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan.

### 4. Dapat dibandingkan

Pemakai laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus bisa membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan keuangan secara relatif.

### 5. Netral

Informasi keuangan harus ditujukan langsung kepada tujuan umum pemakai, bukan untuk ditujukan kepada pihak tertentu saja. Laporan keuangan tidak diperbolehkan berpihak pada salah satu pengguna laporan keuangan tersebut.

### 6. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus dapat disampaikan sedini mungkin sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan

usahanya berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi tersebut.

#### 7. Lengkap

Informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting dan menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa agar tidak menyesatkan pembaca.

### **2.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)**

#### **2.4.1 Pengertian SAK EMKM**

Standar akuntansi berisi pedoman dan acuan untuk penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan antar entitas lebih konsisten. Standar akuntansi terdiri dari pernyataan standar akuntansi dan kerangka konseptual untuk penyusunan laporan keuangan, yang mencakup tujuan, komponen laporan, karakteristik kualitatif, dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2009 telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang juga diintensikan untuk dapat digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM adalah standar akuntansi yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang telah memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang sudah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK

ETAP) dan karakteristik dalam Undang- Undang No 20 Tahun 2008 tentang Uaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM ini adalah standar akuntansi keuangan yang mudah dan lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena SAK EMKM menyusun transaksi yang umum dilakukan oleh suatu UMKM (Nuvitasari et al., 2019).

Ikatan Akuntansi Indonesia (2016) telah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM) yang telah disahkan pada tanggal 24 Oktober 2016 namun mulai berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan pada tanggal 1 Januari 2018.

SAK EMKM bertujuan untuk membantu pelaku UMKM yang kurang pengetahuan dalam membuat laporan keuangan. Menurut (Tatik Amani, 2018) , penyusunan laporan keuangan SAK EMKM lebih mudah dan sederhana bagi pelaku UMKM karena dasar pengukurannya hanya menggunakan biaya historis, sehingga UMKM hanya dapat mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehan.

#### **2.4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM**

Menurut SAK EMKM,( 2016) cara penyajian laporan keuangan yang wajib disusun secara detail oleh pelaku UMKM berdasarkan SAK EMKM yang penyajiannya harus konsisten dan lengkap. Laporan keuangan tersebut minimal terdiri atas:

## 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Informasi tentang laporan posisi keuangan entitas mencakup informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Informasi laporan posisi keuangan yang disajikan mencakup akun-akun berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang
- c. Persediaan
- d. Aset tetap
- e. Utang usaha
- f. Utang bank
- g. Ekuitas

## 2. Laporan Laba Rugi

Informasi tentang kinerja keuangan entitas, termasuk penghasilan dan biaya selama periode pelaporan, disajikan dalam laporan laba rugi. Komponen ini didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penghasilan (*income*), juga dikenal sebagai keuntungan, dapat didefinisikan sebagai peningkatan laba keuangan selama periode pelaporan, yang dapat berupa peningkatan arus kas masuk, peningkatan aset, atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

2) Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode pelaporan yang berupa penurunan arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang dapat mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi suatu entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- b. Beban keuangan
- c. Beban pajak

### 3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah catatan dan informasi tambahan yang disertakan pada akhir laporan keuangan untuk membantu pembaca yang membutuhkan informasi tambahan. Catatan atas laporan keuangan yang disajikan memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Sebuah pernyataan laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM.
- 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi.
- 3) Informasi tambahan dan rincian terhadap akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat terhadap pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi dan rincian tambahan yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan bervariasi tergantung pada jenis bisnis yang dilakukan oleh suatu entitas. Informasi yang terkait dengan setiap akun dalam laporan keuangan ditemukan dalam catatan atas laporan keuangan.

### **2.4.3 Manfaat SAK EMKM**

SAK EMKM dibuat untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan usaha kecil dan menengah (UMKM). SAK juga membantu menyusun laporan keuangan bagi UMKM yang mengalami kesulitan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. SAK EMKM ini sederhana sehingga mudah digunakan oleh bisnis mikro, kecil, dan menengah. Sesuai dengan SAK EMKM, setiap unit usaha harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Setiap pemilik usaha ingin usaha mereka berkembang. Meyakinkan publik bahwa usahanya dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat adalah salah satu upaya untuk mengembangkan usahanya. Menurut SAK EMKM, pertanggungjawaban ini dapat dicapai dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

Manfaat SAK EMKM sangat besar karena membantu para pemilik usaha dalam menjalankan bisnis mereka. SAK EMKM sendiri akan memberikan banyak kemudahan bagi UMKM untuk memperluas bisnis mereka. Menurut Handayani (2018) manfaat SAK EMKM yang secara umum dibagi menjadi 5 bagian, antara lain:

1. SAK EMKM menyajikan laporan keuangan yang mencakup posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi tambahan dan rincian yang relevan, yang membantu mengetahui perkembangan kegiatan usaha.
2. SAK EMKM dapat menyajikan laporan keuangan dengan memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Informasi ini bermanfaat bagi banyak pemakai pengambilan keputusan ekonomi yang terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi.
3. SAK EMKM menawarkan contoh yang jelas tentang cara membuat laporan keuangan yang sederhana namun tetap mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang membuatnya lebih mudah untuk menyusun laporan keuangan.
4. SAK EMKM dapat berfungsi sebagai pedoman akuntansi bagi UMKM selama melakukan usaha mereka, sehingga mereka dapat memperoleh pembiayaan dari industri perbankan.
5. SAK EMKM dapat membantu UMKM mengembangkan kegiatan usahanya dengan memenuhi kebutuhan dan ketersediaan standar akuntansi yang lebih sederhana saat menyusun laporan keuangan.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian yang relevan dan sangat membantu. Selain itu, penelitian ini membutuhkan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian ini. Tabel berikut menunjukkan jurnal-jurnal tersebut:



**Tabel 2.5**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis (Tahun)	Nama Jurnal	Judul Jurnal	Metode Penelitian	Hasil
1	Moudy Olyvia, Lintje Kalangi, Rudy J. Pusung (2019).	M.O.Uno., L.Kalangi., R.J.Pusun g. Analisis Pen.	Analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM) pada usaha mikro, kecil, dan menengah (Studi kasus pada rumah krawon di kota Gorontalo).	Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan di Rumah Karawo masih sangat sederhana, hanya meliputi pencatatan atas penjualan produk. Selain itu, Rumah Karawo juga belum menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yang berlaku dikarenakan minimnya pemahaman akan penyusunan laporan keuangan sesuai standar. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM sudah sepatutnya dilakukan, mengingat laporan keuangan merupakan indikator penting dalam menilai kinerja keuangan dari suatu badan usaha.
2	Sulistina Mangopa, Hartati Tuli, Mulyani Mahmud (2020).	Jambura Accounting Review, Volume 1 No. 2 Agustus 2020, Hal. 70-83.	Analisis penerapan SAK EMKM persediaan pada usaha mikro dan kecil sektor ritel barang harian.	Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM tentang persediaan belum sepenuhnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil. Masih terdapat beberapa poin yang tidak diterapkan. Adapun perbandingan penerapan SAK EMKM pada usaha mikro &

					kecil menunjukkan hasil bahwa usaha kecil lebih unggul jika dibandingkan dengan usaha mikro dengan persentase penerapan sebesar 60,67% atau berada pada rentang kategori Cukup Menerapkan sementara untuk usaha mikro hanya sebesar 40,76% atau Sebagian Kecil Menerapkan.
3	Aning Fitriana (2022).	Jurnal Simki Economic, Volume 5 Issue 2, 2022, Pages 199-207.	Implementasi Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah Bagi Pelaku UMKM Di Kabupaten Purbalingga.	Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaku usaha cukup setuju dengan adanya penerapan SAK EMKM terhadap laporan, Pelaku usaha belum sepenuhnya mengetahui SAK EMKM, dan masih rendahnya penggunaan informasi akuntansi terhadap laporan keuangan.
4	Indah Hari Utari, Agus Subandoro, Anita Kartika Sari, Amrina Yulfajar, dan Wulandari Harjanti (2022).	Jurnal Ekonomi Akuntansi, Hal 109-120 Volume 7. Nomor 2. Oktober 2022.	Analysis Of Financial Statements Of Msmes At The Implementation Of Financial Accounting Standards Of Small And Medium Entity (Sak Emkm)	This study uses a qualitative method.	This study was conducted to analyze the preparation of financial statements in accordance with the statement of SAK EMKM. It is known that Warung Nasi Pecel Madiun Dika Bolo has problems in preparing financial statements, including the lack of manpower and bookkeeping to make financial reports, only recording income and expenses in order to find the profit side due to lack of knowledge

					related to how to make financial reports so that according to SAK EMKM.
5	Rudi Zulfikar1, Kurniasih Dwi Astuti, Tubagus Ismail (2022).	General Management.	Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) in Indonesia: Factors, and Implication.	Hypothesis testing using regression analysis method.	The results prove that MSMEs in Indonesia have not met SAK EMKM. This shows that MSMEs have not used the applicable standards for the management of MSMEs in Indonesia, especially in the preparation of financial reports. Other evidence that MSMEs do not understand or are not ready to implement SAK EMKM; This evidence shows that MSME actors do not understand the importance of issuing SAK EMKM. Other results, costs and benefits, quality of information, and socialization have a positive effect on the level of compliance with SAK EMKM. The test results of the sub-sample with large assets that affect SAK EMKM compliance are the quality of information and socialization, while the sub-sample of small assets proves the costs and benefits, and socialization. The difference between the

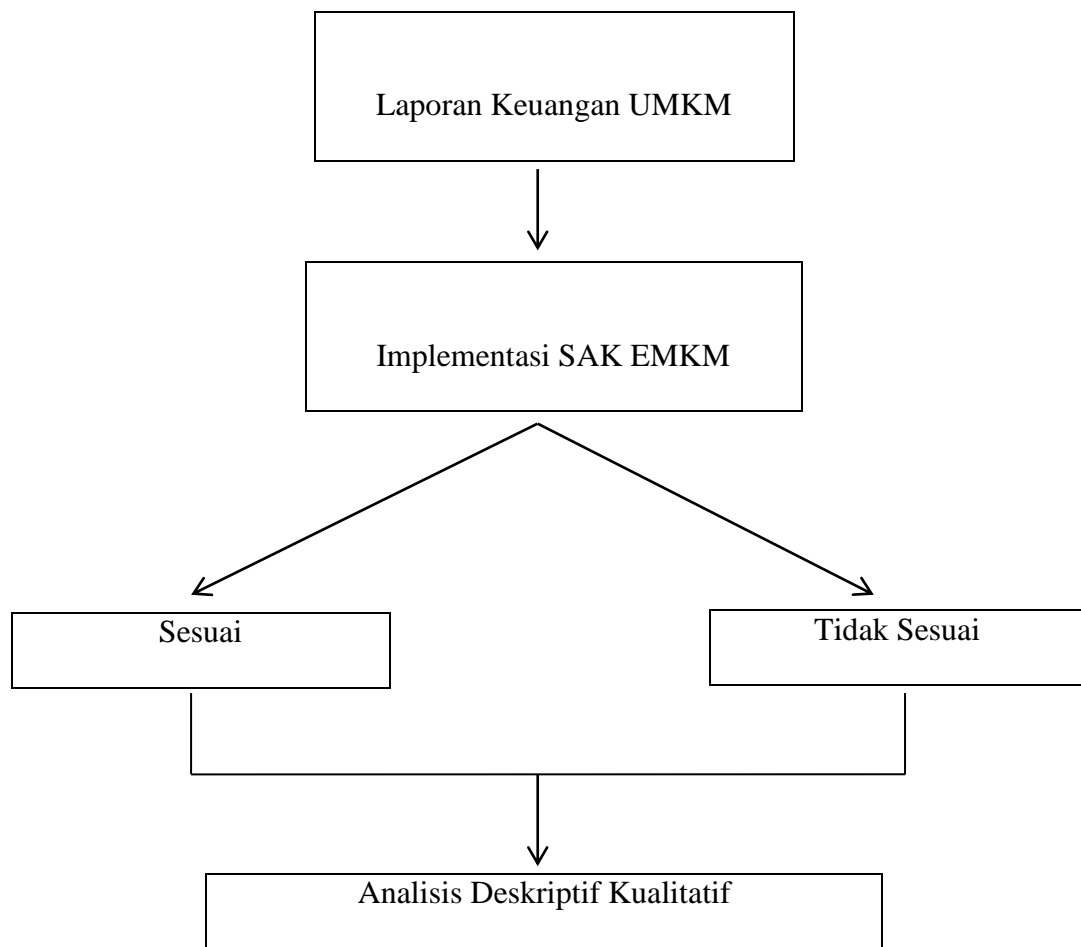
					test results and the sub-samples is due to the different samples. Limitations/implications of this study, namely focusing on MSMEs in Indonesia by not conducting direct interviews with samples due to the COVID-19 pandemic.
6	Nopi Hernawati, Ririn Sri Kuntorini, Irena Paramita Pramono (2019).	Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 409.	The Implementation of SAK EMKM on UMKM Financial Reports.	This study uses a qualitative method.	The result of this study is Cibuntu Tofu UMKM makes financial reports still manual and very simple and not in accordance with standard because business owners do not understand the financial reporting standards specifically for UMKM. The application of financial statements in accordance with SAK EMKM presents financial statements consisting of three components such as financial position reports, income statements, and notes to financial statements. This financial report can be used for accountability, reviewing the company's budget, measuring going concern companies, making business plans, knowing the financial condition and

					submitting additional capital to the bank. This research is also expected to provide information for MSME owners Cibuntu Tofu in implementing SAK EMKM.
--	--	--	--	--	---

Sumber : Diolah Penulis, 2023

## 2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan. Maka dapat di gambarkan kerangka konseptual penelitian ini:



**Gambar 3.1**  
**Kerangka Konseptual**